

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah sebuah bangsa dapat dilihat dari pendidikannya, pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Maju tidaknya sebuah bangsa juga dapat dilihat dari pendidikannya. Jika pendidikan di negara tersebut maju, maju jugalah bangsanya.¹

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²

Masyarakat madani, masyarakat yang selalu kita idam-idamkan sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat yang saling menghargai dan menghormati sesama, akan dapat terwujud hanya dengan pendidikan. Tentunya pendidikan yang bermutu, bukan pendidikan yang asal-asalan. Dalam mencapai tujuan

¹ Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik Hingga Modern* (Jogjakrta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), 5

² Dirjen Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Dalam UU Sisdiknas*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 34

pendidikan tersebut maka diperlukan berbagai faktor atau unsur yang mendorongnya terutama kurikulum yang diterapkan dan dipakai.³

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum yang baik harus selalu berubah-ubah dari waktu-sesuai dengan perkembangan zaman, dan sejak tahun 2006 pemerintah telah mengamanatkan setiap satuan pendidikan untuk membuat KTSP sebagai pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peningkatan mutu pendidikan terus menerus diupayakan oleh pemerintah, sehingga bangsa Indonesia memiliki kemampuan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu upaya tersebut adalah desentralisasi penyelenggaraan pendidikan di mana penyusun kurikulum menjadi tanggung jaab setiap satuan pendidikan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab (UURI Nomor 20/2003).⁴

³ Khaeruddin, Mahfud Junaidi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah* (Yogyakarta : Nuansa Aksara,2007), 5

KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.⁵

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP pasal 1 ayat 15) dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).⁶ Pengembangan KTSP pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi sekolah/madrasah, yang dalam pengembangannya masih tetap menggunakan pendekatan KBK dalam standar isi dan dalam prosesnya mengintegrasikan dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik secara utuh serta tuntutan kondisi lingkungan peserta didik untuk hidup atau memiliki kecakapan hidup (life skill).⁷

⁴ Mutiara O. Panjaitan “Kemampuan Tim Pengembang Kurikulum Merancang Kegiatan Pembelajaran dan penilaian Yang Mengembangkan Ketrampilan Berpikir Kompleks (survei terhadap TPK di 4 Kabupaten)”, *Jurnal Kebudayaan dan Pendidikan* (2009),491

⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 9.

⁶ Ibid., 19-20.

⁷ Muhaimin dkk, *Pengembangan Model KTSP pada Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 9.

KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisiensi dan pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan masing-masing.

Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki "full authority and responsibility" dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam indikator kompetensi, mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah.⁸

Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia adalah madrasah, yang hingga kini masih mengalami problematika dalam pengembangan dan peningkatan mutu proses pendidikannya, karena "madrasah hanyalah menjadi pelaksana program

⁸ Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 21.

yang direncanakan dan diputuskan oleh pusat (DEPAG). Walaupun sekarang sedang gencar-gencarnya program otonomi daerah termasuk dunia pendidikan.⁹

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia, semenjak kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah pendidikan dari bentuk pengajian di rumah-rumah, terus ke mushakka, masjid dan ke bangunan sekolah seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini.¹⁰

Perbedaan utama madrasah dengan pesantren terletak pada sistem pendidikannya. Madrasah menganut sistem pendidikan formal (dengan kurikulum nasional, pemberian pelajaran dan ujian yang terjadwal, bangku dan papan tulis seperti umumnya sekolah model Barat) sementara pesantren menganut sistem non-formal (dengan kurikulum yang sangat bersifat lokal, pemberian pelajaran yang tidak seragam, sering tanpa ujian untuk mengukur keberhasilan belajar siswa, dsb.)

Secara keseluruhan madrasah saat ini sudah melaksanakan standarisasi pelaksanaan kurikulum terutama kurikulum KTSP, ketidakmerataan pemahaman pengelolaan madrasah terhadap tuntunan kurikulum tersebut, menyebabkan ketidaksamaan dalam mengimplikasikan kurikulum tersebut. Hal ini masih banyak dijumpai, beberapa madrasah yang belum memiliki dokumen kurikulum,

⁹ Fery agus wijaya, Eksistensi dan tantangan madrasah dalam sistem pendidikan Nasional “*Conciencia*” *Jurnal pendidikan Islam*, nomor 2 (Desember 2006) VI., 160

¹⁰ Husni Rahim, Anatomi Madrasah di Inonesia “*Edukasi*”: *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Nomor 2(April-Juni 2004) II., 23

dokumen pengembangan silabus, rencana pengajar dan alat-alat evaluasi, kondisi ini menyebabkan terganggunya pengelola madrasah terhadap pemahaman kurikulum.¹¹

Begitu pula MA Darussalam di Pondok Pesantren Darussalam Krempyang sebagai salah satu lembaga pendidikan formal dibawah naungan pondok pesantren dituntut untuk mampu melaksanakan kurikulum KTSP. Ketika dalam satu sisi kewajiban untuk mempertahankan eksistensi tradisi pondok pesantren dengan tradisi pendidikan bermodel salafnya serta upaya untuk mempersiapkan siswa sekaligus santri membekali dengan kemampuan agama dan ketrampilan yang cukup maka untuk mampu bersaing di era reformasi sekaligus dilaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan pondok pesantren. selain itu kewajiban bagi para santri yang bersekolah di MA untuk tinggal dipondok (asrama) di MA Darussalam. Dari fenomena di atas peneliti menganggap penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang problematika Pelaksanaan Kurikulum pendidikan formal khususnya Madrasah aliyah dalam pesantren. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “**Problematika Pelaksanaan Kurikulum KTSP di Madrasah Aliyah Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk.**”

B. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dan sistematis, serta dipahami maka peneliti akan merumuskan beberapa kerangka permasalahan yaitu:

¹¹ Khaeruddin, Mahfud Junaidi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madsah.*, 11

1. Bagaimana pelaksanaan kurikulum KTSP Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk?
2. Problem apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum KTSP Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk?
3. Bagaimanakah langkah-langkah MA Darussalam untuk mengatasi problematika pelaksanaan kurikulum KTSP ?

C. Tujuan Penelitian

Studi kasus terhadap problematika pelaksanaan kurikulum KTSP di madrasah aliyah pondok pesantren memungkinkan munculnya harapan-harapan tersendiri. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan sifat-sifat masalah dan metodologi, untuk memberikan gambaran yang khusus terhadap arah kajian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kurikulum KTSP Madrasah Aliyah yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk
2. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan kurikulum KTSP Madrasah Aliyah yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk
3. Untuk mengetahui cara mengatasi problematika pelaksanaan kurikulum KTSP Madrasah Aliyah yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis khususnya dapat menambah wawasan dan mendalami tentang permasalahan kurikulum di pondok pesantren.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya pada santri.
3. Menambah informasi dan memperluas wawasan tentang kondisi pendidikan Islam serta mengangkat dan mengembangkan citra pesantren.
4. Membangun struktur pemikiran baru di atas landasan fenomena-fenomena pendidikan pondok pesantren, guna memberikan profesionalisasi terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam.
5. Bagi Lembaga yang diteliti, diharapkan dapat membantu lembaga dalam melaksanakan KTSP di pondok pesantren, dan mengatasi problematika dalam melaksanakan kurikulum.
6. Bagi peneliti, sangat membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya sehingga mendapatkan data yang lengkap dan relevan, serta menambah pengalaman dan juga masukan bagi bekal mengajar sebagai guru bidang studi agama Islam yang berhasil dalam profesinya.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum ini diharapkan dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan reformasi, guna menjawab tantangan arus globalisasi, luntur dan adaptif terhadap berbagai perubahan sehingga dengan adanya kurikulum tingkat satuan pendidikan diharapkan dapat memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem yang mencakup keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, diharapkan mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif dan siap menghadapi berbagai macam tantangan dengan tetap bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peningkatan mutu pendidikan terus menerus diupayakan oleh pemerintah, sehingga bangsa Indonesia memiliki kemampuan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu upaya tersebut adalah desentralisasi penyelenggaraan pendidikan di mana penyusun kurikulum menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan dilakukasn dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi arga negara yang demokratis serta tanggung jawab (UURI Nomor 20/2003).¹²

Sejak tahun 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah diberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan (*empowering*) terhadap masyarakat setempat untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar, guru dan kepala sekolah, fasilitas dan sarana belajar untuk putra-putri mereka. Peran pemerintah baik diwakili oleh Departemen Teknis maupun oleh pemerintah daerah (Pemda) ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi adalah memberikan dukungan baik berupa dana, fasilitas, dan ekspertis agar dapat terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermanfaat bagi pembangunan kehidupan riil di masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengacu pada standar mutu akademik secara nasional maupun internasional.¹³

¹² Mutiara O. Panjaitan “Kemampuan Tim Pengembang Kurikulum Merancang Kegiatan Pembelajaran dan penilaian Yang Mengembangkan Ketrampilan Berpikir Kompleks (survai terhadap TPK di 4 Kabupaten)”, Jurnal Kebudayaan dan Pendidikan (2009),491

¹³ Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 1